

TAJUK RENCANA

Mempertahankan Harga

TIM Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY beberapa hari terakhir memantau harga kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam pemantauan menjelang Natal dan Tahun Baru 2017 kemarin, sebagian besar harga sembako yang dijual di pasar tradisional, seperti di Pasar Wates Kulonprogo, Pasar Godean Sleman dan Pasar Beringharjo Yogyakarta, masih stabil, bahkan cenderung turun.

Harga cabai di Pasar Wates, misalnya, cenderung turun. Harga cabai merah biasa dan cabai merah keriting turun Rp 5.000 per kg, dari harga Rp 50.000 menjadi Rp 45.000. Sedangkan harga cabai rawit hijau tetap stabil di angka Rp 50.000 per kg dan cabai rawit merah Rp 60.000 per kg.

Jenis komoditas lain yang harganya masih stabil (per kilogram), beras jenis IR2 Rp 8.000, gula pasir Rp 13.000, bawang merah Rp 25.000-Rp 30.000, bawang putih Rp 34.000-Rp 38.000, kacang tanah Rp 21.000. Kemudian harga kedelai Rp 8.000, minyak goreng curah sawit Rp 12.500, minyak goreng curah barco Rp 17.000 dan tepung terigu Rp 6.500. Sementara itu harga sayur mayur cenderung naik, namun tidak terlalu signifikan, rata-rata naik Rp 2.000 per kilogram.

Demikian juga harga sembako di Pasar Beringharjo dan Pasar Godean Sleman yang berhasil dipantau TPID DIY, Senin (19/12) lalu, tidak mengalami kenaikan, masih sama dengan harga sepekan sebelumnya. Beberapa pedagang yang ditemui TPID mengaku harga masih stabil.

Menurut pengakuan pedagang, harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, gula merah, kedelai tidak mengalami kenaikan atau stabil. Dia mengatakan, hanya beberapa bahan pokok saja yang harganya naik, seperti bawang merah super pada pekan lalu harganya Rp 25.000 per kilogram (kg) sekarang menjadi Rp 27.000 per kg. Telur ayam pada minggu lalu dipatok Rp 19.000 per kg sekarang ini menjadi Rp 21.000 per kg.

Sementara itu, harga sembako di Pasar tradisional Godean Sleman juga masih stabil. Kisaran harga barang-barang di pasar tersebut hampir sama dengan Pasar Beringharjo. Kalaupun ada selisih harga, tidak terpaat begitu jauh, yakni Rp 500 sampai Rp 1.000.

Terjaganya harga sembako di daerah ini, tentu melegakan kita. Setidaknya sampai empat hari menjelang Natal, harga sembako masih terkendali. Apalagi pemerintah menjamin, stok barang cukup sampai tahun baru 2017 mendatang. Artinya, harga barang tidak akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, selama barang yang dibutuhkan masyarakat masih tersedia, dan tidak adanya gangguan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Namun yang menjadi masalah klasik, setiap menjelang hari libur nasional atau hari-hari besar keagamaan, barang kebutuhan pokok di pasar tiba-tiba menghilang. Akibatnya, harga melambung dan masyarakat menjadi resah. Semoga hal itu tidak akan terjadi lagi pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2017 maupun pada hari-hari besar lainnya.

Untuk mempertahankan harga tidak naik, memang perlu ada ketegasan dan keberanian pemerintah dalam memberantas para spekulasi pasar, yang disinyalir sering mempermainkan harga barang kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu *extraordinary action* dan secara struktural menutup ruang gerak para spekulasi, maupun memperbaiki tata kelola jalur distribusi, yang dinilai masih terlalu panjang dan berbelit.

Selain itu, untuk menghindari kenaikan harga, pemerintah sering menggelar operasi pasar (OP) secara efektif. Jangan setengah hati, hanya karena perintah, namun benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Manajemen stok pemerintah juga harus baik dan harus lebih proaktif dalam menyerap hasil produksi petani dengan harga yang pantas. Dalam proses pengendalian harga sembako, petani tidak boleh dirugikan, malah harus dimulikan.

Kita tidak bisa mengandalkan proses pengendalian harga pangan hanya dengan cara impor. Selain tidak ada jaminan harga pangan menjadi stabil dan memengaruhi neraca perdagangan, akibat jangka panjangnya adalah mematikan aktivitas para petani produsen pangan nasional. **

Ibu dan Minat Baca Anak

Oleh : Sukirno

dan keluarga. Keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat mempunyai peran penting untuk menumbuhkan minat baca utamanya pada anak. Keluarga dapat digunakan sebagai basis dalam membentuk minat baca anak. Satu di antara anggota keluarga yang dapat berperan dalam menumbuhkan minat baca anak adalah peran seorang ibu.

Minat Baca Anak

Menurut cerita, Pak Habibi kepada saat kecil memiliki minat baca sangat besar. Pada akhirnya mengantarkan beliau sebagai seorang ahli pesawat terbang yang diakui dunia. Hal ini menunjukkan minat baca mempunyai peran penting untuk menjadikan seseorang berhasil. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam buku Pedoman Pembinaan Minat Baca menyebutkan, minat baca adalah perhatian atau kesukaan/kecenderungan hati untuk membaca. Kesukaan membaca ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi perlu dibentuk dengan dipupuk, dibina, diarahkan dan dibiasakan. Minat baca perlu mendapat perhatian karena minat baca merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang untuk belajar.

Terbentuknya minat baca akan membawa pengaruh yang positif, baik secara pribadi ataupun masyarakat. Minat baca merupakan prasyarat untuk mendalami sesuatu masalah dengan mempelajari sesuatu persoalan, hingga dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan peningkatan kecakapan. Bagi masyarakat dengan minat baca tinggi meningkatkan

kecerdasan masyarakat sehingga mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk pengembangan diri dan sikap kritis yaitu mampu mengadakan koreksi mengenai hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat. Di samping itu minat baca juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Di negara-negara maju, membaca sudah menjadi budaya bahkan kebutuhan masyarakat. Masyarakat negara maju menggunakan waktu luang yang dimiliki dengan membaca. Hal ini bisa dilihat saat mereka naik kereta atau dalam bus dengan melakukan aktivitas membaca. Namun berbeda dengan masyarakat negara berkembang, seperti masyarakat Indonesia. Waktu luang yang dimiliki lebih banyak digunakan untuk aktivitas mendengar, mengobrol dan menonton. Budaya baca belum menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat.

Peran Ibu

Ada suatu pendapat yang mengatakan, bahwa di balik kesuksesan suami ada peran penting seorang istri. Di balik kesuksesan anak-anak ada peran penting seorang ibu. Hingga ibu disebut sebagai sosok multi talenta dan soko guru bangsa. Yenny Martiani (2015) dalam Kompasiana menyebutkan, seorang ibu ibarat sekolah. Ini bermakna jika seorang ibu berhasil mempersiapkan generasi, maka ia (si anak yang berkualitas tadi) akan mampu mencetak bangsa yang unggul dikarenakan kualitas IQ, EQ dan SQnya yang sudah dipupuk semenjak

kecil. Kehadiran ibu merupakan sosok penting dalam proses pendidikan anak, satu di antaranya adalah menumbuhkan minat baca anak.

Minat baca perlu dikembangkan sejak dini, mulai dari masa bayi bahkan sampai orang dewasa, yaitu usia pra sekolah (0-5 tahun), masa anak sekolah (6-12 tahun), dan masa remaja (13-18 tahun). Masa-masa usia tersebut peran ibu sebagai orang yang paling dekat mempunyai andil besar untuk menumbuhkan minat baca anak. Untuk itu, ibu bisa melakukan peran dalam menumbuhkan minat baca anak, yaitu *pertama*, membiasakan dan memotivasi anak untuk senang membaca. *Kedua*, memilihkan bacaan atau buku-buku yang sesuai dengan usia perkembangan anak. *Ketiga*, memberikan teladan pada anak untuk membaca buku-buku bacaan. Jika peran tersebut dapat dilakukan oleh ibu, maka ibu mampu berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa terkait rendahnya minat baca masyarakat.

Sudah banyak diakui, kontribusi ibu dilakukan dalam berbagai aspek, baik dalam rumah tangga, bermasyarakat, bahkan dalam bermegara. Sentuhan ibu merupakan sosok yang banyak memberikan inspirasi bagi anak, rumah tangga, masyarakat, dan peradaban bangsa. Jasa dan pengorbanan seorang ibu tidak mungkin untuk dilupakan. Selamat hari ibu 22 Desember jasmu akan terkenang selalu. **

Sukirno, S.IP., MA.

Kepala Perpustakaan Fak. Kedokteran Unum UGM, dan Pembina Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI) DIY.

Dilema Pendamping Desa

Oleh: Riza Multazam Luthfy

dibiarkan terus melenggang. Kemunculan pendamping desa senantiasa meresahkan para pemegang teguh *status quo* yang selama ini kerap terbebani dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, BPD diberi wewenang untuk mengadakan kontrol terhadap pemerintahan desa, agar kinerja kepala desa beserta jajarannya bisa terarah. Di satu sisi, BPD berperan besar dalam terwujudnya demokrasi desa. Ruang kontrol dan keseimbangan kekuasaan di desa jadi lebih terbuka. Para lurah yang memiliki *sense of legitimacy* tentu merasa diuntungkan dengan hadirnya BPD.

Di sisi lain, ternyata BPD tidak memberikan sumbangs berarti terhadap pelemagaan demokrasi desa secara maksimal. Timbul masalah baru, sebab lembaga perwakilan tersebut menjalankan kewenangannya secara kebablasan. Tidak sedikit kepala desa yang mengeluh dan melaporkan bahwa dirinya telah didzolimi. Mereka menganggap bahwa BPD terlalu "menekan", sehingga tak heran jika mereka menyebutnya dengan Badan Provokasi Desa. Menurut kepala desa, BPD juga sering melakukan pelanggaran terhadap batas-batas kekuasaan yang telah digariskan kepadanya (Ade Chandra, 2005: 230).

Untuk sementara, kegelisahan ini mampu disikapi secara "dingin". Kepala desa menganggap bahwa dibanding BPD posisi pendamping desa kurang berpengaruh, meski keduanya sama-sama dibekali tugas pengawasan (ketetapan legislasi menetapkan bahwa BPD berperan mengawasi jalannya pemerintahan desa,

sedangkan pendamping desa mengawasi penggunaan dana desa).

Lain halnya dengan BPD yang terkesan sulit dijinakkan, pendamping desa cenderung rentan dikondisikan. Para birokrat lokal menilai bahwa pendamping desa adalah "anak kemarin sore" yang minim pengalaman. Mereka kurang memahami dinamika perpolitikan lokal. Jika BPD mampu menunjukkan tarungnya, maka pendamping desa ibarat macan ompong yang takut bahkan terhadap mangsanya sendiri. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah pendamping desa.

Perlunya Harmonisme

Semestinya dibentuknya pendamping desa bertujuan agar dana desa yang dicairkan di setiap desa tersalurkan dengan baik. Mereka mendapat mandat untuk membimbing pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan transparan. Digelontorkannya dana desa terutama dalam rangka memperbaiki sarana desa, semisal jalan, jembatan, gorong-gorong, irigasi, dan lain-lain.

Akan tetapi, realitas berkata lain. Pemanfaatan dana desa terbukti menyala prosedur. Rupiah yang digelontorkan dari pemerintah pusat ternyata dijadikan "bancakan" bagi tokoh-tokoh lokal. Kasus-kasus penyelewengan terjadi di beberapa tempat. Penggelembungan dana (*mark up*) atas pembangunan desa sering kali ditemukan. Parahnya, berdiri sejumlah CV dadakan yang dimanfaatkan sebagai kedok oknum yang ingin memperkaya diri.

Pendamping desa hanya menjadi "bulan-bulanan" elit-elit desa. Mereka menjadi korban kekejaman aktor politik lokal. Mereka adalah tumbal bagi pihak

yang bernafsu mengekalkan kekuasaan dan gelimang materi. Baik kecamatan maupun pemerintah desa merasa terganggu dengan kehadiran pendamping desa. Mereka dianggap "perusuh" yang mengobrak-abrik tatanan. Siklus permainan politik di tingkat lokal terancam buyar seiring dengan dukungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas eksistensi pendamping desa.

Pendamping desa menghadapi dilema. Di satu sisi, keberadaannya dibutuhkan pemerintah pusat dan masyarakat. Namun, di sisi lain, mereka ditolak oleh kecamatan dan pemerintah desa. Dengan posisi ini, kinerja pendamping desa bisa dipastikan kurang maksimal. Dalam menjalankan tugas, mereka dibayangi oleh beragam intimidasi, baik fisik maupun psikologis. Bahkan, ketika menulis laporan, kerap pemerintah desa mempersulit mereka dalam urusan administratif. Sikap ini menyebabkan pendamping desa menyimpan dendam terhadap elit-elit lokal, khususnya kepala desa.

Fenomena di atas mengakibatkan masyarakat pedesaan terkotak-kotak. Secara tidak langsung, orang-orang desa terfragmentasi menjadi dua bagian: para pendukung kepala desa yang anti-perubahan dan mereka yang menghendaki kemajuan.

Dengan demikian, sinergitas harus tercipta antara pemerintah desa dengan pendamping desa. Harmonisme bukan berarti upaya mensinergikan berbagai kepentingan, namun lebih pada ikhtiar menjalankan fungsi masing-masing pihak dengan mekanisme *checks and balances*. **

Riza Multazam Luthfy

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.



SURAT PEMBACA

Libur Sekolah

"Libur tlah tiba... libur tlah tiba... Hore! Hore!" Syair lagu yang dipopulerkan penyanyi cilik Tasya beberapa tahun yang lalu cukup melekak di benak sebagian orang setiap kali libur panjang tiba. Kesederhanaan syairnya begitu tepat menggambarkan suasana hati kebanyakan anak usia sekolah ketika datang hari libur. Rangkaian ujian akhir sekolah (UAS) telah selesai dilakukannya. Para peserta didik

lah, anak cenderung melakukan aktivitas fisik secara rutin sesuai irama pembelajaran di sekolah menyebabkan asupan makanan bisa teratur. Sementara saat libur, aktivitas fisik anak otomatis berubah atau berkurang, bahkan sangat mungkin anak menghabiskan waktunya untuk main game, nonton tv, bermalam-malam, diperparah dengan pola makan yang sembarangan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lung & Blood